



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP)

TAHUN 2020

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS
2021**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan KaruniaNya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2020 telah selesai disusun.

LKjIP disusun guna menyajikan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban Kinerja suatu Instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dan dokumen perencanaan Instansi.

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama 1 tahun yang memuat pencapaian Kinerja program dan kegiatan tahun 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas No. 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas. Disamping keberhasilan yang telah diraih, masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas selama 1 tahun.

Kami berharap LKjIP ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Semoga Allah SWT senantiasa meringankan langkah upaya dan niat baik kita dalam melaksanakan tugas.

Purwokerto, 14 Januari 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS



Drs. YAYAH SETIYONO, MM

Pembina Utama Muda
NIP.19640514 198503 1 010

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas No. 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian yang merupakan kewenangan daerah kabupaten.

GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut Dinas Komunikasi dan Informatika, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
 2. Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik; dan
 3. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik;
- d. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari :
 1. Seksi Tata Kelola e-Government;
 2. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
 3. Seksi Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas;

- e. Bidang Statistik, Persandian, dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 2. Seksi Statistik; dan
 - 3. Seksi Persandian dan Telekomunikasi.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok jabatan fungsional.

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dibentuk UPTD. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Jabatan fungsional di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saat ini terdapat jabatan fungsional pranata komputer.

PERMASALAHAN UTAMA

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas, permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap* antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan serta antara kondisi yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan. Secara garis besar permasalahan-permasalahan pembangunan di Kabupaten Banyumas khususnya yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- **Komunikasi dan Informatika**
 - a. Masih terbatasnya infrastruktur komunikasi dan informatika
- **Statistik**
 - a. Belum terstandarnya pengelolaan data statistik sektoral
- **Persandian**
 - a. Belum terstandarnya keamanan data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas

Dalam konteks Dinas Komunikasi dan Informatika, Isu strategis yang terkait adalah tentang Tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan di suatu daerah. Tanpa tata kelola yang baik, proses penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dibutuhkan komitmen bersama mulai dari level pimpinan tertinggi sampai dengan staf yang paling rendah serta partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disamping komitmen, kualitas sumber daya aparatur juga memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur menjadi perhatian besar Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga mampu memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi khususnya teknologi informasi serta mampu berinovasi untuk meningkatkan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) juga menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun demikian infrastruktur pendukung penerapan e-government tersebut sampai saat ini belum optimal.

Tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal dengan penggunaan anggaran yang makin efektif dan efisien pembangunan dan untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan infrastruktur daerah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya.

Beberapa permasalahan teknis utama yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut:

1. Aplikasi dan Informatika

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Banyumas
- b. Belum semua layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik
- c. Belum terintegrasinya aplikasi yang ada di masing-masing perangkat daerah (masih digunakan secara parsial)
- d. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi yang sudah ada oleh perangkat daerah
- e. Masih kurangnya kompetensi SDM teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
- f. Belum optimalnya pengembangan ekosistem SPBE dan Smart City dalam pemanfaatan TIK

2. Informasi dan Komunikasi Publik

- a. Belum optimalnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan informasi dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas

- b. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas yang merupakan kordinator pengelola informasi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Banyumas belum mendapatkan perhatian secara maksimal dari OPD
 - c. Belum optimalnya pembinaan kemitraan dengan kelompok informasi masyarakat (KIM) yang merupakan mitra informasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas
3. Statistik Sektoral
- a. Masih kurangnya personil yang mengurus data dan statistik
 - b. Masih terbatasnya aplikasi untuk menampilkan data statistik
 - c. Masih minimnya pengetahuan dalam pengelolaan data statistik
 - d. OPD enggan untuk menampilkan data yang dimiliki
4. Persandian untuk Pengamanan Informasi
- a. SDM yang menangani persandian yaitu Sandiman belum tersedia
 - b. Masih terbatasnya penggunaan dan pengembangan jaringan infrastruktur telekomunikasi antar OPD
 - c. Masih terbatasnya pengetahuan dan komitmen dalam pemanfaatan keamanan informasi TIK
 - d. Belum optimalnya fasilitas pelayanan dan perluasan jangkauan telekomunikasi/masih adanya daerah blankspot
 - e. Aplikasi untuk melakukan tes ketahanan Sistem Informasi belum tersedia

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas di Tahun 2020 di bidang komunikasi dan informasi meliputi pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah dan pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pengukuran kinerjanya dilakukan dengan mengacu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peringkat Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang dapat dicapai.

Di bidang statistik dilaksanakan guna menyediakan publikasi data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah sebagai peningkatan pelayanan statistik. Adapun kinerja di bidang statistik meliputi penyusunan data statistik. Data statistik yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten adalah statistik sektoral yang diwujudkan dalam buku Data dan Informasi Kabupaten Banyumas setiap tahunnya. Di tahun-tahun mendatang, masih perlu ditingkatkan tata kelola statistik sektoral ini, mulai dari penyusunan dan penerapan peraturan satu data, metadata statistik, dan peningkatan kuantitas serta kualitas data sektoral yang disusun.

Sedangkan bidang persandian melaksanakan kinerja keamanan data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Banyumas. Kinerja ini sejalan dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi, dimana masyarakat dapat mengakses segala jenis informasi termasuk data dan informasi dari pemerintah yang memerlukan pengamanan data pemerintah. Di bidang persandian ini perlu ditingkatkan kualitas OPD yang menggunakan layanan keamanan informasi dan standardisasi keamanan informasi baik aplikasi, data, maupun infrastruktur pendukungnya misalnya pusat data, jaringan, dan sumber daya manusia.

Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL 2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Formulasi = Hasil indeks SPBE Tipe Perhitungan = Non kumulatif Sumber data = Hasil evaluasi pelaksanaan SPBE	2,65
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Peringkat Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Formulasi = Hasil Pemeringkatan KIP Tipe perhitungan = Non kumulatif Sumber data = Hasil Pemeringkatan KIP	5
3	Meningkatnya tata kelola e-government	1. Prosentase aplikasi yg dibangun & dikembangkan	Formulasi = Jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan : jumlah rencana aplikasi yang dibangun dan dikembangkan x 100% Tipe perhitungan = non kumulatif Sumber data = Rencana pembangunan dan pengembangan aplikasi Pemkab	40%
		2. Prosentase SDM yang melek IT	Formulasi = Jumlah SDM yang melek IT : Jumlah SDM yang dilatih IT X 100% Tipe Perhitungan = kumulatif Sumber data = Hasil monev pelatihan	40%
4	Meningkatkan keamanan informasi	1. Persentase OPD yang menggunakan layanan keamanan informasi	Formulasi = Jumlah pengamanan sistem informasi elektronik yang terselenggara dengan baik : jumlah pengamanan sistem informasi yang ada X 100% Tipe Perhitungan = kumulatif Sumber data = Laporan Insiden	43%

1	2	3	4	5
		2. Prosentase Standarisasi elemen pusat data	Formulasi : Jumlah elemen pusat data yang terstandarisasi Tipe Perhitungan : non kumulatif Sumberdata : Hasil penilaian standarisasi elemen pusat data (Annex SMKI)	17 Annex
5	Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik	1. Persentase Data Informasi dan Statistik yang terpublikasi dengan baik	Formulasi : Jumlah informasi statistik yang tersusun dengan baik /Jumlah informasi statistik yang ada X 100% Tipe Perhitungan : non kumulatif Sumberdata : Hasil inventarisasi data statistik	100%

Sedangkan anggaran yang mendukung sasaran strategis tahun 2020 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2 ANGGARAN YANG MENDUKUNG SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020

NO	TUJUAN/ SASARAN	ANGGARAN	KET
1	Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah	12.378.957.087	APBD
2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	343.385.380	APBD
3	Meningkatnya tata kelola e-government	9.101.570.087	APBD
4	Meningkatkan keamanan informasi	3.277.387.000	APBD
5	Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik	343.385.380	APBD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berikut akan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut, dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020

Target dan realisasi kinerja tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 target dan realisasi indikator kinerja tahun 2020

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,60	3,09	118%
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Peringkat Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	5	8	62,5%
3	Meningkatnya tata kelola e-government	1. Prosentase aplikasi yg dibangun & dikembangkan	40%	40%	100%
		2. Prosentase SDM yang melek IT	40%	40%	100%
4	Meningkatkan keamanan informasi	1. Persentase OPD yang menggunakan layanan keamanan informasi	43%	43%	100%
		2. Prosentase Standarisasi elemen pusat data	17 Annex	17 Annex	100%
5	Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik	1. Persentase Data Informasi dan Statistik yang terpublikasi dengan baik	100%	100%	100%

Dalam 9able di atas dapat dilihat ada beberapa pencapaian dan penurunan kinerja di tahun 2020. Dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): Ringkasan hasil penilaian Indeks SPBE Tahun 2020 adalah sebagai berikut: 3.09 dengan Predikat SPBE : Baik
- Dari data di atas, sudah melampaui target yang diinginkan yaitu 2.90 sesuai target tahunan RPJMD untuk tahun 2020.

- b. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan indikator Peringkat Tingkat Keterbukaan Informasi Publik:
Walaupun secara nilai naik, dibandingkan tahun 2019, tetapi peringkat KIP Pemerintah Kabupaten Banyumas mengalami penurunan dan meleset dari target. Target di peringkat 4 namun hanya bisa peringkat 8. Hal ini karena adanya peningkatan kualitas informasi dan komunikasi publik kabupaten kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Meningkatnya tata kelola e-government
Sudah sesuai target untuk kedua target indikatornya.
 - d. Meningkatkan keamanan informasi
Sudah sesuai target untuk kedua target indikatornya.
 - e. Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik
Sudah sesuai target untuk target indikatornya.
2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun lalu
- Target dan realisasi kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 dapat dilihat dalam 10able berikut:

Tabel 3.2 perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2019 dan 2020

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,80	2,65	95%	2,60	3,09	118%	Sangat tinggi
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Peringkat Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	5	5	100%	5	8	62,5%	Rendah
3	Meningkatnya tata kelola e-government	1. Prosentase aplikasi yg dibangun & dikembangkan	20%	20%	100%	40%	40%	100%	Sangat tinggi
		2. Prosentase SDM yang melek IT	20%	20%	100%	40%	40%	100%	Sangat tinggi
4	Meningkatkan keamanan informasi	1. Persentase OPD yang menggunakan layanan keamanan informasi	21%	21%	100%	43%	43%	100%	Sangat tinggi
		2. Prosentase Standarisasi elemen pusat data	17 Annex	17 Annex	100%	17 Annex	17 Annex	100%	Sangat tinggi
5	Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik	1. Persentase Data Informasi dan Statistik yang terpublikasi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat tinggi

Dalam tabel di atas dapat dilihat ada beberapa pencapaian dan penurunan kinerja di tahun 2020. Dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE):
Ringkasan hasil penilaian Indeks SPBE Tahun 2020 adalah sebagai berikut: 3.09 dengan Predikat SPBE : Baik
Dari data di atas, sudah melampaui target yang diinginkan yaitu 2.90 sesuai target tahunan RPJMD untuk tahun 2020.
 - b. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan indikator Peringkat Tingkat Keterbukaan Informasi Publik:
Walaupun secara nilai naik, dibandingkan tahun 2019, tetapi peringkat KIP Pemerintah Kabupaten Banyumas mengalami penurunan dan meleset dari target. Target di peringkat 4 namun hanya bisa peringkat 8. Hal ini karena adanya peningkatan kualitas informasi dan komunikasi publik kabupaten kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Meningkatnya tata kelola e-government
Sudah sesuai target untuk kedua target indikatornya.
 - d. Meningkatkan keamanan informasi
Sudah sesuai target untuk kedua target indikatornya.
 - e. Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik
Sudah sesuai target untuk target indikatornya.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan target jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Banyumas
Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan target jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 perbandingan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2020 dengan RPJMD

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	TARGET RPJMD	CAPAIAN RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,60	3,09	118%	3,50	88%
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Peringkat Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	5	8	62,5%	2	25%
3	Meningkatnya tata kelola e-government	1. Prosentase aplikasi yg dibangun & dikembangkan	40%	40%	100%	60%	66%
		2. Prosentase SDM yang melek IT	40%	40%	100%	60%	66%
4	Meningkatkan keamanan informasi	1. Persentase OPD yang menggunakan layanan keamanan informasi	43%	43%	100%	100%	43%
		2. Prosentase Standarisasi elemen pusat data	17 Annex	17 Annex	100%	17 Annex	100%
5	Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik	1. Persentase Data Informasi dan Statistik yang terpublikasi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%

Dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): Ringkasan hasil penilaian Indeks SPBE Tahun 2020 adalah sebagai berikut: 3.09 dengan Predikat SPBE : Baik
Dari data di atas, masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target RPJMD.
 - a. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan indikator Peringkat Tingkat Keterbukaan Informasi Publik:
Dari data di atas, masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target RPJMD.
 - b. Meningkatnya tata kelola e-government
Dari data di atas, masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target RPJMD.
 - c. Meningkatkan keamanan informasi
Sudah sesuai target untuk salah satu target indikatornya, dan masih memerlukan kerja keras untuk target indikator satunya.
 - d. Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik
Sudah sesuai target untuk target indikatornya.
4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- a. Untuk Peringkat Tingkat Keterbukaan Informasi Publik masih diperlukan upaya untuk mencapai target yang diinginkan. Strateginya adalah melakukan pendalaman pada nilai yang masih rendah nilainya dan mengadakan konsultasi serta studi komparasi.
 - b. Persentase aplikasi yang dibangun dan dikembangkan
Masih diperlukan upaya untuk mencapai target yang diinginkan. Strateginya adalah melakukan analisis aplikasi yang sudah ada – apakah perlu dikembangkan atau dihapus, melakukan seleksi dan pendalaman pada aplikasi yang baru akan diajukan pembangunannya, bekerjasama dengan seksi terkait di bidang Aplikasi Informatika dan bidang lain yang terkait untuk peningkatan daya dukung terhadap aplikasi.
 - c. Persentase SDM yang melek IT
Tidak sesuai target karena di tahun 2020 terjadinya pandemi Covid-19 sehingga pelatihan TIK menjadi terkendala. Hal ini dicoba diatasi dengan pelatihan daring, pelatihan ke lokasi OPD/in house training, dan pelatihan dengan pembatasan peserta.

B. ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS

Efektifitas dan efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasaran
Tahun Anggaran 2020

NO	TUJUAN/ SASARAN	ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA	PROSENTASE (%)
1	Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah	12.378.957.087	11.698.614.220	94,5
2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	343.385.380	307.298.665	89,49
3	Meningkatnya tata kelola e-government	9.101.570.087	8.610.425.910	94,60
4	Meningkatkan keamanan informasi	3.277.387.000	3.088.188.310	94.23
5	Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik	343.385.380	307.298.665	89,49

Tabel 3.5 Tingkat efektivitas anggaran tahun 2020

NO	TUJUAN/ SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	RATA RATA CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN	PROSENTASE REALISASI ANGGARAN (%)
1	Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah	1	118%	11.698.614.220	94,5
2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	1	62,5%	307.298.665	89,49
3	Meningkatnya tata kelola e-government	2	100	8.610.425.910	94,60
4	Meningkatkan keamanan informasi	2	100	3.088.188.310	94.23
5	Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik	1	100	307.298.665	89,49

Tabel 3.6 Tingkat Efisiensi anggaran tahun 2020

NO	TUJUAN/ SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	RATA RATA CAPAIAN KINERJA (%)	PROSENTASE REALISASI ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah	1	118	94,5	23,5
2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	1	62,5	89,49	-
3	Meningkatnya tata kelola e-government	2	100	94,60	5,4
4	Meningkatkan keamanan informasi	2	100	94.23	5,77
5	Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik	1	100	89,49	10,51

C. ANALISA PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut disampaikan program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

Tujuan pertama Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah dengan indikator Indeks SPBE, memperoleh hasil yang memuaskan dibandingkan target tahun 2020 dan capaian tahun sebelumnya. Hal ini sangat didukung dengan berbagai kegiatan yang mendukungnya. Kegiatan ini pada umumnya mencapai target dan masuk dalam penilaian SPBE di tingkat pusat. Kegiatan dimaksud antara lain Fasilitasi Pengembangan Aplikasi, Pengembangan Ekosistem E - Government, Penyelenggaraan Tata Kelola E-Government, Pengembangan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data, Pemeliharaan jaringan internet dan intranet, web hosting dan updating data website, Pengembangan data center, NOC dan data recovery center, Penanganan Keamanan Informasi Audit TIK, Pemeliharaan Peralatan Sandi dan Telekomunikasi, Pembangunan dan Pemeliharaan Repeater Telekomunikasi, Optimalisasi pemungutan retribusi menara telekomunikasi.

Sementara tujuan kedua yaitu Meningkatnya keterbukaan informasi publik dengan indikator peringkat Keterbukaan Informasi Publik (KIP) walaupun secara nilai mengalami kenaikan poin namun secara peringkat menurun dibandingkan dari tahun sebelumnya dan tidak memenuhi target tahun 2020 ini. Hal ini dikarenakan adanya beberapa rencanan dalam kegiatan yang tidak dapat terlaksana karena refocusing dan adanya perbaikan nilai dari kabupaten lain dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

D. PENGHARGAAN / PRESTASI YANG DIRAIH TAHUN 2020

1. Juara Harapan I Lomba Video Tingkat OPD dalam rangka Lomba Video dan Audio Pencegahan Covid-19 Kabupaten Banyumas Tahun 2020.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2020 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana pada Bab III , dapat disimpulkan bahwa dari kelima tujuan/sasaran strategis dengan rata-rata capaian kinerja adalah 96,1 % dengan predikat **SANGAT TINGGI** , dengan rincian sebagai berikut:

1. Tujuan/Sasaran strategis ke-1, Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah dengan rata-rata capaian 118% dengan predikat sangat tinggi .
2. Tujuan/Sasaran strategis ke-2, Meningkatnya keterbukaan informasi publik dengan rata-rata capaian 62,5 dengan predikat rendah.
3. Sasaran strategis ke-3, Meningkatnya tata kelola e-government dengan rata-rata capaian 100% dengan predikat sangat tinggi.
4. Sasaran strategis ke-4, Meningkatkan keamanan informasi dengan rata-rata capaian 100% dengan predikat sangat tinggi.
5. Sasaran strategis ke-4, Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik dengan rata-rata capaian 100% dengan predikat sangat tinggi.

Capaian kinerja tujuan pertama yaitu Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah mencapai 118% karena adanya peningkatan pencapaian indeks SPBE dibandingkan target dan hal ini sangat mendukung untuk pencapaian kinerja serupa di tahun tahun mendatang. Berbagai inovasi dan ketersediaan infrastruktur TIK akan makin meningkatkan kinerja OPD dalam pelayanan publik.

Sedangkan kinerja tujuan kedua yaitu Meningkatnya keterbukaan informasi publik mengalami penurunan sehingga hanya mencapai 62,5%. Hal ini menjadi evaluasi untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas. Selain dengan lebih berkoordinasi dengan instansi terkait, tetapi juga meningkatkan inovasi dan optimalisasi sumber daya yang ada

Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga dapat diterima dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan. Apabila pada Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2020 terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan akan kami lakukan menjadi lebih baik untuk tahun-tahun berikutnya

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2020;
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020;
3. Penghargaan: Juara Harapan I Lomba Video Tingkat OPD dalam rangka Lomba Video dan Audio Pencegahan Covid-19 Kabupaten Banyumas Tahun 2020.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Penganugerahan

Pada kegiatan Lomba Video & Audio Pencegahan Covid-19 dalam penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Banyumas tahun 2020 dengan tema
"Banyumas BeBas Covid-19 (Mas Basid)"

Memberikan Penghargaan Kepada :

DINKOMINFO KABUPATEN BANYUMAS

sebagai

JUARA HARAPAN I

Untuk Kategori Video Tingkat Organisasi Perangkat Daerah

Purwokerto, 26 November 2020

Bupati Banyumas

Ir. Achmad Husain